

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bachtiar, 2015, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengajuan UU Terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Husni, Lalu, 2020, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Rajagrafindo Persada, Depok.
- Kansil, C.S.T, 2015 *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Pangaribuan, Juanda, 2017, *Seluk Beluk Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial*, Misi, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2002 *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Sidharta, 2010, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Depok.
- Soepomo, Imam, 1997. *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan. Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW, 2019, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Syahrani, Riduan, 2000, *Seluk Beluk dan Asas Asas Hukum Perdata (Edisi Revisi)*, Alumni, Bandung.
- Syaukani, Imam dan Thohari, A. Ahsin, 2015, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Uwiyono, Aloysius, *et.al*, 2018, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Jakarta, Rajawali Pers

Karya Tulis dan Artikel Ilmiah

Sjaiful, Muh. “Problematika Normatif Jaminan Hak-Hak Pekerja Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, *Media Iuris*. Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara. Vol. 4 No. 1, Februari 2021.

Febrianto, Wibowo Rudi, dan Herawati, Ratna. “Perlindungan Bagi Pekerja Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum*. Universitas Diponegoro, Semarang. Vol.3, No 1, Tahun 2021.

Nurfaqih, Irfani. “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior; Pemaknaan, problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Vol 17, No 3 Tahun 2020.

Sukadi, Imam, “Matinya Hukum dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia”, *Risalah Hukum*, Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Vol. 7, No. 1, 26 Juni 2011, 39-53 ISSN 0216-969X.

Allen, Emma Rose, dan Kyloh, Robert, November 2016, *Labour reforms in Indonesia: an agenda for greater equity and efficiency*, International labour Organisation ILO dan Asian Development Bank.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KUHPerduta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4316).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 443).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245).

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep-78/MEN/2001 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Beberapa Pasal Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Ganti Kerugian di Perusahaan.

Surat Edaran No. SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Konstitusi Republik Indonesia Nomor 012/PUU-I/2003 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertanggal 17 November 2004

Putusan Konstitusi Republik Indonesia Nomor No. 19/PUU-IX/2011 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertanggal 13 Juni 2012.

Internet

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia , “Menaker Ida Jelaskan 3 Sasaran Penting Dalam Undang-Undang Cipta Kerja”
<https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-ida-jelaskan-3-sasaran-penting-dalam-undang-undang-cipta-kerja>.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia , “Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”
<https://www.youtube.com/watch?v=Fxbktp4OxWc>,

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, “Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, <https://www.youtube.com/watch?v=epPfKCJsqt8>,

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “49 Peraturan Pelaksana UU Cipta kerja resmi Diundangkan dalam Lembaran Negara RI”, <https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/49-peraturan-pelaksana-uu-cipta-kerja-resmi-diundangkan-dalam-lembaran-negara-ri-yasonna-laoly-vaksin-untuk-memulihkan-perekonomian-nasional>,

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Naskah Akademis RUU Tentang Cipta Kerja”, <https://uu-ciptakerja.go.id/naskah-akademis-ruu-tentang-cipta-kerja/>,

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Terhadap UUD 1945”, https://search.mkri.id/?q=%22no+11+tahun+2020+tentang+cipta+kkerja%22&case_type=%5B%22puu%22%5D,

Fakultas Hukum UGM, “Catatan Kritis Dan Rekomendasi terhadap RUU Cipta Kerja” <https://rispub.law.ugm.ac.id/wpcontent/uploads/sites/1049/2020/03/Brief-Catatan-Kritis-edit.pdf>,

HKLN Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, “Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 35 sesi 1” <https://www.youtube.com/watch?v=N0DDW1mhoIcS>,

Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, “Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 sesi 2” <https://www.youtube.com/watch?v=udLONwpZjz8>,

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online

Wojowasito S dan Wasito Tito. 2007 Kamus lengkap Inggris Indonesia. Hasta, Bandung.

Wawancara

Elly Rosita Silaban, Presiden KSBSI

Fajar Dwi Whisnu Wardani, Tenaga Ahli Utama Kedeputusan 3 KSP

Saut Christianus Manalu - Hakim Ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (2006 – 2016)

Lain-lain

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Materi Paparan Sosialisasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja oleh Reni Mursidayanti, Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Materi Paparan Sosialisasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja oleh Adriani, sekretaris Direktorat Jenderal pembinaan hubungan Industrial dan Jaminan sosial tenaga kerja 17 November 2020

Naskah akademis RUU Cipta kerja

ILO, Memorandum Komentar Teknis atas Rancangan Undang Undang tentang penciptaan Pekerjaan (RUU Cipta Kerja) Republik Indonesia dari ILO

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online

Wojowasito S dan Wasito Tito. 2007 Kamus lengkap Inggris Indonesia. Hasta, Bandung.